

**PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS
PANTAI**

TESIS

Oleh :

CANDRA

2202190049



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS
PANTAI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

CANDRA

2202190049



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CANDRA
NIM : 2202190049
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI” :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 21 OKTOBER 2024



CANDRA
NIM: 2202190049



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS
PANTAI**

Oleh:

Nama : Candra
NIM : 2202190049
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 18 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.
NIDN: 0331038704

Pembimbing II

Dr. Mangisj Simanjuntak, S.H., M.H.
NIDK: 8804630017

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Paltada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 191691/0305097105

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



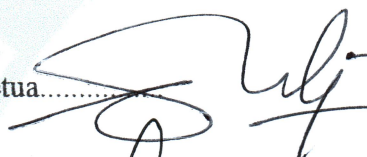
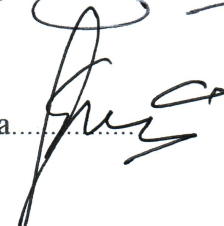
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 9 Desember 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Candra
NIM : 2202190049
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H	Sebagai Ketua.....	
2. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota.....	

Jakarta, 9 Desember 2024



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Candra

NIM : 2202190049

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN
LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-eksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 21 OKTOBER 2024



Meterai Rp 10.000

Candra

NIM: 2202190049

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada khadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai”**.

Untuk itu, dengan berbagai keterbatasan yang ada, penulis melakukan usaha dan upaya yang berpadu dengan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung berupa pengajaran, bimbingan, diskusi, dan petunjuk maupun tidak langsung melalui serapan bacaan dan lain sebagainya, pikiran-pikiran itu menemukan bentuknya yang terangkai dalam susunan kata, kalimat dan halaman demi halaman tesis ini. Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Edwin Soeryadjaya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MBA , Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Wakil Rektor bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia (UKI)
4. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA., Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI)
5. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI)
6. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H., Selaku Pembimbing I
7. Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada keluarga tercinta Rini Kurnia (Istri), Muhamad Ridel (Anak Pertama), Muhamad

Rigel (Anak Kedua), Mirabel Zahra (Anak Ketiga), Melati Rizqi Hutami (Menantu) Aldira Putri Anggraini (Menantu), dan Keenan El Khalidi Ibrahim (Cucu) yang telah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar.

Demikian yang dapat peneliti sampaikan dan semoga pembahasan dalam Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membacanya.

Jakarta, Januari 2025

Penulis



Candra



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR..	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	8
1. Kerangka Teori	8
2. Kerangka Konsep.....	14
F Metode Penelitian.....	16
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Orisinilitas Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 26
A. Tinjauan Teori Hukum.....	26
1. Teori Kepastian Hukum.....	26

2. Teori Penegakan Hukum.....	45
B. Tinjauan Umum Konflik.....	57
1. Pengertian Konflik.....	57
2. Faktor Penyebab Konflik.....	58
C. Tinjauan Umum Pengeboran Lepas Pantai.....	61
1. Pengertian Pengeboran Lepas Pantai.....	61
2. Sejarah Pengeboran Lepas Pantai.....	62
3. Proses Pengeboran Lepas Pantai.....	63
4. Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.....	66
BAB III ATURAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH	
PENGEBORAN LEPAS PANTAI.....	69
A. Pengaturan Pegelolaan Wilayah Pengeboran Lepas Pantai ...	69
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	72
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.....	78
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	83
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional.....	90
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penetapan Alur Pelayaran dan Daerah Lingkungan Kerja serta Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.....	95
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak Dan Gas Bumi.....	99
B. Kepastian Hukum Pengelolaan Wilayah Pengeboran Lepas Pantai.....	103

BAB IV	PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM	
	PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA NELAYAN	
	LOKAL DAN PIHAK PENGEBORAN LEPAS PANTAI	123
	A. Konflik Antara Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran	
	Lepas Pantai	123
	1. Sumber Konflik.....	124
	2. Dampak Konflik.....	134
	B. Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Konflik Antara	
	Nelayan Lokal dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai.....	145
	1. Kepatuhan Terhadap Hukum	146
	2. Mediasi.....	150
BAB V	PENUTUP	154
	A Kesimpulan	154
	B Saran.....	155
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Judul : Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai

Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi. Meskipun sudah ada regulasi mengenai zona akses nelayan lokal, pelanggaran masih terjadi, di mana nelayan memasuki area kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, sehingga mengganggu operasi pengeboran dan meningkatkan risiko kecelakaan. Teori dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dalam negara, khususnya pada aktivitas nelayan dan pengeboran lepas pantai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari berbagai pendekatan penelitian di bidang hukum, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur (studi pustaka) sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai diatur oleh berbagai peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Ini sangat penting dalam konteks pengeboran lepas pantai, di mana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran, konflik, dan kerusakan lingkungan. Aspek utama kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pengeboran meliputi kepastian dalam perizinan dan regulasi, pengelolaan lingkungan, penegakan aturan dan sanksi, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, peran penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hukum dan mediasi. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, seperti dialog antara nelayan dan perusahaan. Melalui forum diskusi, kedua belah pihak dapat memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi saling menguntungkan, seperti kompensasi bagi nelayan terdampak atau investasi dalam program pengembangan masyarakat lokal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Konflik, Nelayan, Pengeboran Lepas Pantai

ABSTRACT

Title : *The Role of Law Enforcement in Resolving Conflicts Between Local Fishermen and Offshore Drilling Parties*

In Indonesia, conflicts frequently arise between local fishermen and offshore oil drilling entities. Despite the existence of regulations governing access zones for local fishermen, violations continue to occur, as fishermen enter areas designated for offshore oil drilling activities. This intrusion disrupts drilling operations and heightens the risk of accidents. The theoretical framework of this study encompasses the theory of legal certainty and the theory of law enforcement, aimed at ensuring that legal rules are applied and adhered to in daily life, both within society and the state, particularly concerning the activities of fishermen and offshore drilling.

This study is a normative legal research. Among various research approaches in the field of law, the author employs the statute approach. The data used in this research consists of primary and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique used for data collection is literature review, while the analysis employed in this study is qualitative analysis

Based on the research findings, it is evident that the management of offshore drilling areas is regulated by various laws, ranging from statutes to ministerial regulations, aimed at enforcing legal frameworks to resolve conflicts between local fishermen and drilling companies. In a rule of law state, all actions of the government and society must conform to applicable laws to maintain social order and security. This is particularly crucial in the context of offshore drilling, where the exploration and exploitation of natural resources require a clear legal framework to prevent violations, conflicts, and environmental damage. Key aspects of legal certainty in the management of drilling areas include certainty in licensing and regulation, environmental management, enforcement of rules and sanctions, and dispute resolution. Furthermore, the role of law enforcement in resolving conflicts between local fishermen and offshore drilling companies is significantly influenced by compliance with the law and mediation. To address these conflicts, an inclusive and sustainable approach is required, such as facilitating dialogue between fishermen and companies. Through discussion forums, both parties can understand each other's interests and seek mutually beneficial solutions, such as compensation for affected fishermen or investment in local community development programs.

Keywords: *Law Enforcement, Conflict, Fishermen, Offshore Drilling*